ANALISIS KINERJA SATUAN PENGAWAS SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PELAYANAN PENERBITAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL DAN SURAT LAIK OPERASI DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) KENDARI

SKRIPSI

Oleh:

FAUZIAH LESTARI
1622080441

PROGRAM STUDI PENGELOAAN PELABUHAN PERIKANAN
JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2020

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA SATUAN PENGAWAS SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PELAYANAN PENERBITAN HASIL PEMERIKSAAN KAPAL DAN SURAT LAIK OPERASI DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) KENDARI

SKRIPSI

Oleh:

FAUZIAH LESTARI
1622080441

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan JurusanTeknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Sulaiman, S.Pi.,M.Si
NIP. 197009101995121001

Pembimbing II,

Ir. Syamsul Hadi, M.Si
NIP. 196203191989031001

Mengetahui :

Direktur,

Dr. Ir. Darmawan, M.P.
NIP. 19670202 199803 1 002

Ketua Jurusan,

Syamsul Marlin Amir, S.T.,M.Si.
NIP. 19710529200501 1 001

Tanggal Ujian : 11 September 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	:	Analisis Kinerja Satuan PengawasSumberdaya Kelautan Dan Perikanan Dalam Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Dan Surat Laik Operasi Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari
Nama	:	Fauziah Lestari
NIM	:	1622080441
Program studi	:	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Jurusan	:	Tekonologi Penangkapan Ikan

Menyetujui,
Tim Penguji :

1. Dr. Muhammad Sulaiman, S.Pi.,M.Si (.....)
2. Ir. Syamsul Hadi, M.Si. (.....)
3. Mukhlisa A.Gaffar S.Pi., M.Si (.....)
4. Lendri S.St.Pi., M.Si (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Sitti Muslimah Bachrum, S.Pi., M.Si.
NIP. 197106051997032001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Barru, 15 Juni 2020

Yang menyatakan

Fauziah Lestari

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua terkhusus bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Analisis Kinerja Satuan Pengawas SumberDaya Kelautan dan Perikanan Dalam Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal dan Surat Laik Operasi di Pelabuhan PerikananSamudera (PPS) Kendari".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Rahmatia, Ayahanda Muhammad Syahrir, serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hanya doa dan bakti penulis yang dapat di persembahkan pada Ibunda dan Ayahanda serta segenap keluarga atas segala pengorbanannya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Darmawan, M.P Selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
2. Bapak Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si**.** Selaku Ketua Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.
3. Dr. Muhammad Sulaiman, S.Pi.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ir. Syamsul Hadi, M.Si Selaku Pembimbing II.
5. Dosen beserta Staf Akademik Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
6. Rekan-rekan mahasiswa program studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebagai kawan seperjuangan, sahabat dan sebagai saudara selama perjalanan studi di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.

7. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat ilmu dan informasi kepada segenap pembaca. Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, dengan demikian kritik, saran masukan yang membangun sangatdiharapkan dalam penyempurnaan laporan ini.

Barru, 15 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
DAFTAR ISTILAH xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pelabuhan dan Kapal Perikanan 5
2.2 Definisi Pelayanan 6
2.3 Definisi HPK Dan SLO 8
BAB III METODOLOGI
3.1 Waktu dan Tempat 11
3.2 Metode Penelitian 11
3.3 Metode Pengambilan Data 12
3.4 Analisis Data 13
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PKPM
4.1 Profil PPS Kendari 15
4.1.1 Sejarah PPS Kendari 15
4.1.2 StrukturOrganisasi 16
4.1.3 Landasan Hukum PPS Kendari 17
4.1.4 Visi dan Misi PPS Kendari 17
4.1.5 Fasilitas PPS Kendari 18

4.2 Profil Satwas SDKP Kendari 21
4.2.1 Visi Dan Misi Satwas SDKP Kendari 21
4.2.2 Tujuan, Tugas Dan Fungsi Satwas SDKP Kendari 22
4.2.3 Dasar Hukum Satwas SDKP Kendari 22
4.2.4 Ruang Lingkup Pengawasan Satwas SDKP Kendari 24
4.2.5 Wilayah Kerja Dan Personil Satwas SDKP Kendari 24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Penerbitan HPK Dan SLO Di PPS Kendari 30
5.2 Kinerja Satwas SDKP dalam Pelayanan HPK Dan SLO..... 37
5.3 Masalah Dalam Pelayanan HPK Dan SLO..... 40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 41
5.2 Saran 42
DAFTAR PUSTAKA 43
LAMPIRAN..... 45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 59

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 4.1 Daftar Fasilitas Pokok PPS Kendari 18
Tabel 4.2 Daftar Fasilitas Fungsional PPS KendariTabel..... 19
Tabel 4.3. Fasilitas Penunjang PPS Kendari 20
Tabel 4.4 Data Transmitter VMS On-line Bulan Januari Tahun 2020..... 22
Tabel 4.5 Daftar Kepegawaian Satwas SDKP Kendari 25

Tabel 5.1 Jenis Kapal Yang Dibuatkan HPK dan SLO Bulan Januari 2020... 30
Tabel 5.2 Rekapitulasi Penerbitan HPK Dan SLO Tahun 2019 34
Tabel 5.3 Data Jumlah HPK dan SLO Bulan Januari – April 2020..... 36
Tabel 5.4 Nilai Presepsi, Interval SKM, Kinerja dan Kualitas Pelayanan..... 38
Tabel 5.5 Kinerja Satwas SDKP Kendari Dalam Pelayanan HPK dan SLO.. 39

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PPS Kendari..... 16

Gambar 5.1 Grafik Ketaaatan HPK dan SLOKapal Bulan Januari 2020.....30

Gambar 5.2 SOP Penerbitan HPK dan SLO Kapal di PPS Kendari..... 32

Gambar 5.3 Grafik jumlah HPK dan SLO tahun 2019..... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1Lay Out PPS Kendari 46
Lampiran 2 Perhitungan Survei Kepuasan Kinerja Pelayanan 47
Lampiran 3Contoh Dokumen Persyaratan Penerbitan HPK dan SLO..... 49
Lampiran 4 Contoh Dokumen HPK dan SLO 50
Lampiran 5 Kuesioner Penelitian 51

Daftar Istilah Terkait Pelayanan SLO Dan HPK

- BA-HPK : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (Keberangkatan)
- DJPT : Direktoral Jenderal Perikanan Tangkap
- DKP : Dinas Kelautan Dan Perikanan
- HC : Health Certificate (Sertifikat Kesehatan)
- HPK D : Hasil Pemeriksaan Kapal Datang (Kedatangan)
- HPK : Hasil Pemeriksaan Kapal
- IUU : Illegal, Unreported, Unregulated
- KKP : Kementrian Kelautan Perikanan
- PEB : Persetujuan Ekspor Barang
- PHP : Pungutan Hasil Perikanan
- PPS : Pelabuhan Perikanan Samudera
- PSDKP : Pangkalan SumberDaya Kelautan Dan Perikanan
- PPP : Pungutan Pengusahaan Perikanan
- SATWAS : Satuan Pengawas
- SDKP : SumberDaya Kelautan Dan Perikanan
- SIMWASKAN : Sistem Informasi Pengawas Perikanan
- SIUP : Surat Izin Usaha Perikanan
- SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan
- SIKPI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
- SKAT : Surat Keterangan Aktivitas Transmitter
- SKA : Surat Keterangan Asal
- SKAI : Surat Keterangan Asal Ikan
- SLO : Surat Laik Operasi
- SPB : Surat Persetujuan Berlayar
- SPKP : Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
- TPI : Tempat Pendaratan Ikan
- UPI : Unit Pengolaan Ikan
- UPT : Unit Pelaksanaan Teknis
- VMS : Vessel Monitoring System
- WPP : Wilayah Pengelolaan Perikanan

ABSTRAK

Fauziah Lestari. 1622080441**.**Analisis Kinerja Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Dalam Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Dan Surat Laik Operasi Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Dibimbing oleh Muhammad Sulaiman danSyamsul Hadi.

Pengawasan dibidang administrasi yang dilakukan oleh Satwas SDKP kendari berupa pelayanan penerbitan hasil pemeriksaan kapal (HPK) dan surat laik operasi (SLO)sangatlah penting dalam kelangsungan kegiatan penangkapan ikan di PPS kendari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuikinerja Satwas SDKP Kendari dalam pelayanan penerbitan HPK dan SLO dan kendala yang dialami selama pelayanan penerbitan HPK dan SLO di PPS Kendari

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2020 di PPS Kendari Sulawesi Tenggara. Metodepada penelitian yaitudeskriptif kuantitatif, dengan pengambilan data primer dan data skunder melalui wawancara dokumentasi dan pembagian kusioner kepada 20 orang, sedangkan pengambilan sample menggunakan teknik *simple random sampling*pada nelayan, dan agen/pengurus kapal sebagai pengguna jasa layanan paling sering miniman 2 bulan di PPS Kendari. Penilaian kinerja menggunakan skala likert 1-4 (sangat memuaskan, memuaskan, tidak memuaskan, dan sangat tidak memuaskan) yang didapatkan dari tingkat kepuasanresponden yang menggunakan jasa layanan, kemudian diolah secara statistik dalam aplikasi Microsoft Excell.

Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal dan Surat Laik Operasi oleh Satwas SDKP kendari sudah sesuai dengan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2017. Pada tahun 2019 Satwas SDKP kendari menerbitkan HPK keberangkatan dan Surat Laik Operasi sebanyak 5772, sedangkan HPK kedatangan 4731. Secara umum kinerja Satwas SDKP Kendari dalam pelayanan Hasil Pemeriksaan Kapal dan Surat Laik Operasi yang dilihat dari survei kepuasan pengguna sudah sangat baik dan sangat memuaskan dengan nilai SKM 89,100. Adapun beberapa unsur pelayanan yang perlu dipertahankan yaitu: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, keamanan dan keadilan pelayanan, jenis dan kemampuan petugas, perilaku petugas, serta sarana prasarana memadai. Sedangkan unsur pelayanan saran dan masukan terbilang memuaskan artinya masih perlu ditingkatkan seperti pengadaan kotak saran bagi pengguna layanan.Kendala dalam pelayanan HPK dan SLO di PPS kendari yang biasa dialami selama pelayanan diantaranya; akses jaringan yang kadang error, sebagian nelayan telat melaporkan kedatanganya dan kurangnya budaya antri yang dimiliki oleh pengguna layanan.

Kata Kunci : Satwas SDKP Kendari, SLO, dan HPK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak digaris Katulistiwa 02º 45'- 06º15'LS dan 120º 25` - 124º45' BT. Memiliki luas wilayah 148,140 km², meliputi luas daratan 38,140 km² dan luas lautan 110,000 km². Panjang garis pantai 1.740 km, Dengan wilayah lautan yang lebih luas maka kegiatan usaha perikanan menjadi salah satu faktor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap kinerja sektor perikanan (BPS Sultra 2016). Secara administratif, Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara berbatasan langsung dengan : sebelah Barat berbatasan dengan Sulawesi Selatan Teluk Bone, Sebelah Timur dengan Propinsi Maluku di Laut Banda, Sebelah Utara dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, Sebelah Selatan dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur di laut Flores (Sholeh, 2018).

Pelabuhan perikanan samudera (PPS) Kendari berada di WPP 714 (Laut Banda dan Teluk Tolo) dan WPP 715 (Laut maluku, Laut halmahera dan Laut seram) yang memiliki potensi sumber daya ikan yang besar dan kaya,dalam kegiatan perekonomian, telah memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi masyarakat seperti fasilitas produksi, pemasaran hasil perikanan, pengawasan pemanfaatan dan pelestaraian sumberdaya ikan, pelayanan kesyahbandaran, mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta penyerapan tenaga kerjadan lainnya (DJPTK Profil PPS Kendari 2019).

Tahun 2016, produksi perikanan tangkap Sulawesi Tenggara menyumbang 149.200 ton atau 2,23% produksi perikanan tangkap nasional. Jika dilihat dari data statistik, produksi perikanan tangkap Sulawesi Tenggara tersebut menurun 2,81% jika dibandingkan produksi tahun 2015. Namun jika dilihat dari sisi nilai, produksi perikanan tangkap Sulawesi Tenggara tahun 2016 meningkat sebesar 18,54% dari Rp 2,47 Trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp 2,93 Trilyun. Peningkatan nilai produksi ini diperkirakan karena adanya perubahan struktur produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tenggara. Besaran nilai produksi tersebut merupakan hasil dari kerja keras 73.473 nelayan yang tergabung dalam 27.250 RTP-PP perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum(KKPRI. 2018)

Aktivitas kegiatan penangkapan ikan yangdilakukan oleh nelayan maupun pengusahaperikanan di PPS Kendari, dalam rangka pemanfatan sumber dayaikan harus diimbangi dengan upaya pengawasanpemanfaatan sumber daya perikanan untuk menjagakelestarian sumber daya kelautan dan perikanan,mengamankan usaha perikanan serta melindungikeberlanjutan mata pencaharian masyarakatperikanan. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di pelabuhan perikanan samudera kendari menjadi tugas utama Satuan Pengawas (Satwas) SumberDaya Kelautan dan Perikanan Kendari. Pengawasan dibidang administrasi yang dilakukan oleh Satwas SDKP Kendari berupa pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO),

Pelayanan penerbitan HPK dan SLO yang diberikan oleh satwas SDKP Kendari sangat penting bagi nelayan di PPS Kendari, dengan adanya pelayanan jasa yang optimal maka dapat diketahui kinerja pegawai satwas SDKP Kendari baik atau sebaliknya. Atas pertimbangan tersebut maka diadakan penelitian

tentang**“Analisis Kinerja Satuan Pengawas SumberDaya Kelautan Dan Perikanan Kendari Dalam Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal DanSurat Laik Operasi di PPS Kendari.”** untuk mengetahui seperti apakah penerbitan HPK dan SLO di PPS kendari, kinerja petugas dalam pelayanan penerbitan HPK dan SLOserta kendala yang dialami petugas selama pelayanan.

1.2. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah penerbitan HPK dan SLO di PPS Kendari?
- Bagaimanakah kinerja Satwas SDKP Kendari dalampelayanan penerbitan HPK dan SLO di PPS Kendari?
- Apa saja kendala dialami dalam pelayanan penerbitan HPK dan SLO di PPS Kendari?

1.3. Batasan Masalah

Dari uraian masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba mambatasi masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini batasan masalah hanya akan berpusat pada bagaimana “Kinerja satwas SDKP dalam pelayanan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal dan Surat Laik Operasil Di PPS Kendari” yang didasari pada standar kepuasan pengguna layanan sesuai petunjuk dalam keputusan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017.

1.4. Tujuan Penelitian

- Mengetahui penerbitan HPK dan SLO di PPS Kendari
- Menganalisiskinerja Satwas SDKP Kendari dalam pelayanan penerbitan HPK dan SLO di PPS Kendari.
- Mengetahuikendala yang dialami selama pelayanan penerbitan HPK dan SLO di PPS Kendari

1.5. Manfaat Penelitian

- Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan jangka waktu berbeda ataupun lokasi berbeda.
- Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Satuan Pengawas SumberDaya Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyusun keputusan dalam melakukan pelayanan penerbitan HPK dan SLO yang baik kedapannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Pelabuhan Dan Kapal Perikanan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempatkegiatan pemerintahan dankegiatan pengusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapalbersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhkapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi“ (Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan” Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atasdaratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batastertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dankegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakansebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi denganfasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatanpenunjang perikanan.

Pelabuhan Perikanan menurut PER.08/MEN2012 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.Sedangkan Kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam

menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah. (KKP RI, 2012)

Secara umum kapal perikanan adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dilaut, danau, atau sungai, berbagai jenis kapal laut digunakan dalam penangkapan ikan komersial, olahraga, maupun rekreasi (*http://id.m.wikipedia.org/wiki/kapal_penangkap_ikan*).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alatapung lain yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan, mendukung operasi penangkapanikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,pengolahan ikan, pelatihan perikanan, danpenelitian/eksplorasi perikanan.

1.2. DefinisiKinerja Pelayanan

Kinerja merupakan sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai melaluipendekatannya untuk mengelola danmengembangkan sumberdaya manusiamelalui suatu cara yang dapatmeningkatkan sasaran dalam suatu jangkawaktu tertentu. Pelayanan dapat di artikan sebagai usaha untuk dapat melayani orang lain,sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang (Poltak Sinambela 2011:5).

KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan *public* adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip

pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang relevan, valid, dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survei kepuasan masyarakat sebagai berikut ;

1. Persyaratan pelayanan ; adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik pelayanan teknis maupun administrasi.
2. Prosedur pelayanan ; adalah tata cara pelayanan di bakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian ; adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya tarif ; adalah ongkos yang dikenakan bagi penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayana dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk dan jenis pelayanan ; adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis layanan.
6. Kompetensi pelaksana/petugas ; adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana ; adalah adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan.
8. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan ; adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana ; adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, sedangkan sarana adalah benda yang bergerak (komputer, mesin) yamg membantu terlaksananya proses.

Adapun unsur ke 4 dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundang-undangan biaya tidak dibeberkan kepada penerima layanan (konsumen). Oleh karena itu pada penelitian ini unsur biaya pelayanan akan di ganti menjadi unsur keadilan dan keamanan pelayanan.

1.3. DefinisiHasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Dan Surat Laik Operasi (SLO)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 menyatakan “Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) /Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO”.

Sedangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikananmenyatakan “Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnyadisebut SLO adalah surat keterangan yangmenyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhipersyaratan administrasi dan kelayakan teknis untukmelakukan kegiatan perikanan. Persyaratan Penerbitan SLOditerbitkan setelah kapal perikanan memenuhipersyaratan administrasi dan kelayakan teknis, yaitu:

1. Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
    a. SIPI asli
    b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan denganukuran di atas 30 (tiga puluh) GT
    c. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telahmelakukan kegiatan penangkapan ikan dan
    d. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muatdengan SIPI.
2. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkapikan,terdiri dari:
    a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomorseri mesin utama, tanda selar, dan namapanggilan/***call sign***
    b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI dan
    c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP,untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
3. Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
    a. SIKPI asli
    b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT
    c. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapalpengangkut ikan antar daerah
    d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkutdengan surat keterangan asal ikan untuk antardaerah, atau surat Pemberitahuan

Ekspor Barang(PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;

e. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor
f. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI dan
g. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.

4. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
   a. Kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan denganSIKPI yang meliputibahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan namapanggilan/***call sign***;
   b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengankapasitas ruang penyimpanan ikan;
   c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untukkapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30(tiga puluh) GT
   d. Keberadaan dan keaktifan ***closed circuit television***(CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
   e. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronikpemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikandengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yangmelakukan alih muatan ikan untuk kapalpengangkut ikan.

Prosedur penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017yaitu:

1. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan ataupenanggung jawab perusahaan perikanan yang akanmelakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.

2. Laporan rencana keberangkatan kapaldisampaikan paling lambat 1(satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.
3. Pengawas Perikanan berdasarkan laporan akan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasidan kelayakan teknis kapal perikanan.
4. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dankelayakan teknis dituangkan dalam BA-HPK.
5. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, ataupenanggung jawab perusahaan perikanan.
6. Berdasarkan BA-HPK apabila kapal perikanan telahmemenuhi persyaratan administrasi dan kelayakanteknis,Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 20 Januari sampai pada 23 Maret 2020. Tempat pelaksanaan penelitiandi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari berada di Kel. Puday, Kec. Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kuantitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik.

Dalam penelitian ini dilakukan survei tentang kinerja Satwas SDKP Kendari dalam pelayanan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO), dengan penilaian kinerja dalam pemberian pelayanan menggunakan skala likert 1-4(sangat memuaskan, memuaskan, tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan) yang didapatkan dari pembagian kusioner kepada nelayan ataupun agen kapal yang menggunakan jasa pelayanan.

Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sample dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiono.2001). Adapun karakteristik yang dijadikan sample pada penelitian ini yaitu nelayan, agen/pengurus kapalyang telah melakukan permohonan penerbitan HPK dan SLO paling sering minimal 2 bulan di PPS

Kendari, selanjutnya dijadikan sebagai penilai kinerja satwas SDKP kendari dalam pemberian jasa pelayanan HPK dan SLO.

Jenis data yang diambil pada penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, yang akan dijadikan sebagai data umum dan kemudian diolah sendiri oleh penulis, contoh hasil wawancara, pembagian kusioner dengan pihak yang terkait dengan penilaian kinerja dalam pelayanan satwas SDKP Kendari dalam penerbitan HPK dan SLO.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya, pada penelitian ini data skunder didapatkan berupa gambaran startegis geografis pelabuhan, struktur organisasi pelabuhan/satwas SDKP Kendari, dokumen tahunan/bulanan dan lainnya

3.3. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuisioner

Pengisian kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden. Penggunaan instrumen tes awal dan tes akhir yang bertipe kuesioner pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja satwas SDKP Kendari dalam pelayanan penerbitan HPK dan SLO.

2. Wawancara

Menurut Santoso (2005), wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan carabertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi.

3. Dokumentasi

Metode Pengumpulan data melalui pencatatan dan menyelidiki terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian, seperti buku-buku,arsip-arsip,catatan harian dan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti(Nazir, 2005).

3.4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari data bulanan/laporan tahunan, dokumen dll yang ada di Satwas SDKP kendari diolah menggunakan aplikasi *Micrososf Excel* menggunakan tabel dan grafik kemudian di narasikanmenjadi data kualitatif. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui berapajumlah penerbitan HPK dan SLO yang ada di PPS Kendari selama 2019 dan 2020 (Januari-April),sementara untuk mengetahui kendala/masalah yang dialami selama pelayanan dapat diketahui dengan melakukan pengamatan langsung.

Analisis kinerja satwas SDKP kendari dalam pemberian pelayanan penerbitan HPK dan SLO menggunakan metode analisis kuantitatif dari jawaban responden akan di uji statistik menggunakan aplikasi *Micrososf Excel* dan dinarasikan sehingga menghasilkan data kualitatif (Lampiran 2). Proses analisis data yang digunakan sesuai dengan petunjuk dalam keputusan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017

Pada penilitian ini menggunakan hanya menggunaka 9 variabel diantara variabel-variabeldimana kinerja satwas SDKP Kendari yang dinilai dari survei kepuasan masyarakat (SKM) pengguna layanan dengan 9 unsur/indikator pelayanan yang diberikan dalam penerbitan HPK dan SLO oleh satwas SDKP kendari, mengunakan rumus :

$$\textbf{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\textbf{Jumlah Bobot}}{\textbf{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh SKM unit pelayanan menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\textbf{SKM} = \frac{\textbf{Total dari nilai presepsi per unsur}}{\textbf{Total unsur yang terisi}} \times \textbf{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, menggunakan rumus :

$$\textbf{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Dikarenakan unit pelayanan memiliki karakteristik berbeda-beda maka setiap unsur/indikator pelayanan memungkinkan

1. Menambah unsur yang dianggap relevan
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur/indikator pelayanan, dengan catatan jumlah bobot unit keseluruhan yaitu tetap 1